



WORKSHOP IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DI LINGKUNGAN MGMP IPS KABUPATEN BANDUNG BARAT

Khaerul Syobar¹, Erni Wantini Widaningsih²
^{1,2} Prodi Pendidikan IPS Program Magister STKIP Pasundan
STKIP Pasundan

Abstrak. Penerapan Kurikulum Merdeka sebagai kebijakan pendidikan terbaru di Indonesia menuntut perubahan paradigma pembelajaran, khususnya dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) IPS berperan penting dalam mengembangkan kapasitas guru agar mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas workshop implementasi Kurikulum Merdeka yang dilaksanakan di lingkungan MGMP IPS Kabupaten Bandung Barat.

Kata kunci: Kurikulum Merdeka, MGMP IPS, pembelajaran berbasis proyek, asesmen formatif, diferensiasi pembelajaran.

PENDAHULUAN

Transformasi pendidikan di Indonesia terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Dalam rangka merespons tantangan pendidikan abad ke-21, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan Kurikulum Merdeka, yang memberikan fleksibilitas lebih bagi guru dalam merancang dan mengelola pembelajaran.

Penerapan Kurikulum Merdeka di bidang Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) menuntut perubahan paradigma pembelajaran, dari yang sebelumnya berbasis transfer pengetahuan menjadi pembelajaran berbasis pengalaman dan proyek. Namun, di tingkat implementasi, berbagai tantangan masih dihadapi, terutama dalam lingkup Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) IPS Kabupaten Bandung Barat.

MGMP sebagai wadah profesionalisme guru memainkan peran kunci dalam memastikan implementasi kurikulum yang optimal. Oleh karena itu, melalui workshop ini, diharapkan para guru memperoleh pemahaman mendalam tentang prinsip, strategi, dan praktik terbaik dalam penerapan Kurikulum Merdeka.

PEMBAHASAN

4.1 Tingkat Pemahaman Guru terhadap Kurikulum Merdeka

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebelum workshop, hanya 28% guru yang memahami prinsip pembelajaran diferensiasi dalam IPS. Setelah workshop, angka ini meningkat menjadi 88%, menunjukkan efektivitas pelatihan dalam meningkatkan kompetensi guru.

4.2 Tantangan Implementasi di Sekolah

Meskipun workshop memberikan peningkatan pemahaman, beberapa tantangan tetap dihadapi dalam implementasi Kurikulum Merdeka:

1. Keterbatasan Sumber Daya

Banyak sekolah yang masih menggunakan model pembelajaran konvensional. Kurangnya bahan ajar berbasis proyek yang sesuai dengan karakteristik siswa.

2. Variasi Kemampuan Siswa

Guru mengalami kesulitan dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas dengan tingkat pemahaman yang beragam.

3. Minimnya Penggunaan Teknologi

Beberapa sekolah di Kabupaten Bandung Barat belum memiliki fasilitas teknologi yang memadai untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek.

4.3 Efektivitas Workshop dalam Meningkatkan Kompetensi Guru

Berdasarkan observasi dan wawancara, 90% peserta workshop menyatakan bahwa pelatihan ini sangat membantu dalam:

- a) Merancang model pembelajaran berbasis proyek yang lebih relevan dengan Kurikulum Merdeka.
- b) Meningkatkan pemahaman tentang asesmen formatif, sehingga evaluasi pembelajaran menjadi lebih efektif.
- c) Membangun komunitas belajar di MGMP untuk mendukung implementasi kurikulum secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Workshop ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan guru IPS dalam menerapkan Kurikulum Merdeka. Tantangan yang dihadapi menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam mendukung implementasi kurikulum, terutama terkait penyediaan sumber daya dan pendampingan berkelanjutan bagi guru.

Rekomendasi

1. Pelatihan Berkelanjutan – MGMP IPS perlu mengadakan pelatihan lanjutan mengenai strategi implementasi pembelajaran diferensiasi.
2. Penyediaan Bahan Ajar Berbasis Proyek – Pemerintah daerah dan sekolah harus bekerja sama dalam menyusun materi pembelajaran yang sesuai.
3. Pemanfaatan Teknologi dalam Pembelajaran – Sekolah perlu diberikan akses ke platform pembelajaran digital untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka.
4. Kolaborasi Antar MGMP – Penguatan jaringan antar MGMP di berbagai daerah untuk berbagi pengalaman dan strategi implementasi kurikulum.

REFERENSI

1. Kemendikbudristek. (2022). Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka. Jakarta: Kemendikbudristek.
2. OECD. (2019). Teacher Professional Learning and Development. Paris: OECD Publishing.
3. Piaget, J. (1972). The Psychology of Intelligence. Routledge.
4. Tomlinson, C. A. (2001). How to Differentiate Instruction in Mixed-Ability Classrooms. ASCD.
5. Wiliam, D. (2011). Embedded Formative Assessment. Solution Tree Press.